

## **Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan**

**Muhammad Ersad\*; Amri Amir; Zulgani**

Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Jambi

*\*E-mail korespondensi:muh.ersad@gmail.com*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the development of the Human Development Index (HDI), Unemployment Rate, Poverty Levels in the Southern Sumatra Region, analyze the condition of regional development inequality in the Southern Sumatra Provinces and analyze the influence of the Human Development Index (IPM), Unemployment Rate, Level of Poverty on income inequality in southern Sumatra in 2010-2019. This research is a quantitative research. The data used is a cross section of 5 provinces in Southern Sumatra and time series for 2010-2019. The data is processed by panel data analysis with fixed effect regression model. Based on the results of the HDI panel data regression test, the unemployment rate and poverty rate have a significant effect on income in Southern Sumatra. All research variables have a simultaneous effect on income inequality. Partially, the HDI variable and the poverty level have no effect on income inequality, while from the research variable only the Unemployment Rate has a negative effect on income inequality.*

---

**Keywords:** *income inequality, unemployment rate, poverty level, human development index, fixed effect model.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan di Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Menganalisis kondisi ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi-provinsi Sumatera bagian Selatan dan Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan Pendapatan di Sumatera bagian selatan tahun 2010-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa *crosssection* 5 Provinsi di Sumatera Bagian Selatan dan *time series* selama 2010-2019. Data diolah dengan analisis data panel dengan regresi *fixed effect model*. Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. Seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial variabel IPM dan tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sementara dari variabel penelitian hanya Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

---

**Kata kunci:** ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial,

disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, pemberantasan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat. (Todaro 2004).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Dimana adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju ( Sjafrizal, 2008).

Menurut Todaro (2004) ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Syafrizal (1997), kondisi demografis dalam suatu wilayah meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung meningkat produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

**Tabel 1.** Indeks pembangunan manusia menurut Provinsi di Sumatera Bagian Selatan

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jambi	65,39	66,14	66,94	67,76	68,24	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26	68,49
Sumatera Selatan	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75	67,46	68,24	68,86	69,39	70,02	67,22
Bengkulu	65,35	65,96	66,61	67,50	68,06	68,59	69,33	69,95	70,64	71,21	68,32
Lampung	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57	66,63
Kep. Bangka Belitung	66,02	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30	68,65

*Sumber: BPS, 2020(diolah)*

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010-2019 pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) di Pulau Sumatera Bagian Selatan Provinsi Kep. Pulau Bangka Belitung menempati rata-rata tertinggi sebesar 68,65 diikuti Jambi sebesar 68,49, kemudian Provinsi Bengkulu sebesar 68,32, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 67,22 dan Provinsi Lampung sebesar 66,63. IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori tinggi karena dilihat komponen IPM itu sendiri yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita) mengalami peningkatan yang lebih baik. Dan pada Provinsi lampung terendah diantara 5 Provinsi Sumatera Bagian Selatan karena adanya disparitas pembangunan manusia belum merata dalam Kabupaten/Kota.

Perbedaan ini dapat menjadikan IPM sebagai salah satu alat untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi. Terdapat tiga indikator yang menjadi komposisi sebagai perbandingan pengukuran IPM yakni, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan

standar kehidupan dimana ketiga indikator ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, untuk meningkatkan IPM pemerintah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut disamping itu perlu juga diperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti kesempatan kerja, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.** Tingkat pengangguran terbuka menurut Provinsi di Sumatera Bagian Selatan

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jambi	5,39	4,63	3,20	4,76	5,08	4,34	4,00	3,87	3,86	4,19	4,33
Sumatera Selatan	6,65	6,60	5,66	4,84	4,96	6,07	4,31	4,39	4,23	4,48	5,22
Bengkulu	4,59	3,46	3,62	4,61	3,47	4,91	3,30	3,74	3,51	3,39	3,86
Lampung	5,57	6,38	5,20	5,69	4,79	5,14	4,62	4,33	4,06	4,03	4,98
Kep. Bangka Belitung	5,63	3,86	3,43	3,65	5,14	6,29	2,60	3,78	3,65	3,62	4,17

Sumber: BPS, 2020(diolah)

Berdasarkan Tabel 2 menjelaskan Tingkat pengangguran di Sumatera Bagian Selatan tahun 2010-2019 menunjukkan perbedaan antar wilayah ini. Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengangguran tertinggi dengan rata-rata 5,22 % diikuti Provinsi Lampung sebesar 4,98 %, kemudian Provinsi Jambi sebesar 4,33 %, Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 4,17 % dan Provinsi Bengkulu sebesar 3,86 %, dalam hal ini pengangguran di Sumatera Bagian Selatan masih belum stabil, pengangguran yang tinggi akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya, sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Perlu adanya upaya dalam mengurangi pengangguran dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, peningkatan latihan kerja serta peningkatan standar kehidupan.

Disamping karena Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, terdapat juga kemiskinan. Seperti yang diungkapkan oleh Arsyad (2017) bahwa masalah pemerataan pendapatan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan agar ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin rendah.

**Tabel 3.** Tingkat kemiskinan menurut Provinsi di Sumatera Bagian Selatan Periode

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jambi	8,34	8,65	8,28	8,42	8,39	9,12	8,37	7,90	7,85	7,51	8,37
Sumatera Selatan	15,47	14,24	13,48	14,06	13,62	13,77	13,39	13,10	12,82	12,56	13,77
Bengkulu	18,30	17,50	17,51	17,75	17,09	17,16	17,03	15,59	15,41	14,91	17,04
Lampung	18,94	16,93	15,65	14,39	14,21	13,53	13,86	13,04	13,01	12,30	14,84
Kep. Bangka Belitung	6,51	5,75	5,37	5,25	4,97	4,83	5,04	5,30	4,77	4,50	5,31

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan Tabel 3 menjelaskan perbedaan tingkat kemiskinan diantara provinsi-provinsi yang terdapat di Sumatera Bagian Selatan tahun 2010-2019. Dilihat dari nilainya, terlihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan

yang terendah dengan rata-rata sebesar 5,31 %, diikuti Provinsi Jambi sebesar 8,37 %, kemudian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,77 %, Provinsi Lampung sebesar 14,84 % dan Provinsi Bengkulu berada peringkat tertinggi tingkat kemiskinan sebesar 17,04 %. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin yang berangsur menurun salah satunya ialah sudah meluasnya lapangan pekerjaan yang mulai merambah ke daerah pelosok-pelosok sehingga pendapatan yang didapat mulai meningkat.

Fenomena yang terdapat pada tabel yang diuraikan diatas ditemukan bahwa terdapat persamaan Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka dan kondisi demografis di Wilayah Provinsi Sumatera Bagian Selatan. namun Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan yang sama, ini disebabkan oleh kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki. Kemudian adanya alokasi investasi yang tidak merata di beberapa daerah, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah yang tidak didukung infrastruktur yang baik antar daerah, alhasil akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul **“Dampak IPM, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatra Bagian Selatan Tahun 2010-2019”**

## **METODE**

### **Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi-provinsi di Sumatera Bagian Selatan yaitu Jambi, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Dipilihnya lokasi ini karena pertimbangan bahwa angka IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan.

### **Jenis data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Pusat. Data sekunder yang digunakan merupakan data panel dari hasil silang tempat (*cross section*) 5 Provinsi yang ada di Sumatera Bagian Selatan dan data silang waktu (*time series*) dari tahun 2010-2019 (10 tahun) sehingga jumlah observasi sebesar 50 observasi. Adapun jenis data sekunder yang digunakan terdiri dari data Tingkat Ketimpangan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan tingkat Kemiskinan menurut Provinsi Sumatera Bagian Selatan tahun 2010-2019.

### **Metode pengumpulan data**

Anton Dajan (2001) menyatakan bahwa metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2019. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, serta *Browsing Website Internet* yang terkait dengan masalah konvergensi

**Teknik analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang diijelaskan sebagai berikut :

**Analisis deskriptif kualitatif**

Analisis ini dilakukan dengan beberapa instrumen analisis seperti grafik yang dapat mencerminkan uraian analisis penelitian secara teratur dan saling mendukung. Data sekunder dari buku teks, jurnal dan hasil penelitian yang ada dan berkaitan dengan tesis ini dijadikan dasar bagi analisis deskriptif. Untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama digunakan rumus perkembangan yaitu :

$$Xg(i) = \frac{Xi(t)-Xi(t-1)}{Xi-1} \times 100 \% \dots\dots\dots(1)$$

1. Analisis Kuantitatif

Untuk menjawab tujuan kedua dalam penelitian ini digunakan analisis indeks gini dengan rumus sebagai berikut :

$$G = \sum_{i=1}^k \frac{Pi(Qi + Qi - 1)}{1000} \dots\dots\dots(2)$$

Untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga digunakan analisis regresi data panel, analisis ini dilakukan dengan menggunakan Model ekonometri digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui hubungan timbal-balik antara formulasi teori, pengujian, dan estimasi empiris. Dalam teori ekonometri, data panel merupakan gabungan antara data *cross-section* (silang) dan data *time series* (deret waktu). Dengan demikian, jumlah data observasi dalam data panel merupakan hasil kali data observasi *time series* ( $t > 1$ ) dengan data *cross-section* ( $n > 1$ ). Berdasarkan model yang digunakan oleh Sultan dan Sodik (2010) serta Maqin (2011). Model dasar yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1IPM_{it} + \beta_2P_{it} + \beta_3K_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3)$$

**Uji normalitas**

Uji normalitas dalam analisis regresi dilakukan untuk menguji apakah data yang akan diteliti memiliki variabel pengganggu yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini digunakan statistic pengujian Jarque-Bera yang terdapat dalam program Eviews. Jika nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari nilai Alpha ( $p > \alpha$ ) maka data tersebut berdistribusi normal sedangkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai Alpha ( $p < \alpha$ ) maka data tersebut tidak berdistribusi normal

**Uji multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah salah satu pelanggaran asumsi klasik bahwa suatu model regresi dikatakan baik. Asumsi yang seharusnya dipenuhi adalah bahwa antar variabel bebas tidak terdapat korelasi sehingga estimasi parameter koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas benar-benar menggambarkan pengaruhnya terhadap variabel tak bebas. Penyakit ini terjadi jika pada regresi linear berganda terdapat hubungan antar variabel bebas. Jika suatu model regresi terjangkau penyakit multikolinearitas, maka akan

menimbulkan kesulitan untuk melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan (Gujarati,2003).

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai R<sup>2</sup> dan nilai statistik yang signifikan. Apabila nilai R<sup>2</sup> yang tinggi hanya diikuti oleh sedikit nilai t statistik yang signifikan, maka mengindikasikan adanya masalah multikolinearitas dalam model tersebut. Selain itu, kita juga dapat mendeteksi penyakit multikolinearitas dengan melihat correlation matrix, dimana batas korelasi antara sesama variabel bebas tidak lebih dari |0,8|.

### **Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Ghozali, 2005).

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat ( $u_t^2$ ) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R<sup>2</sup>, untuk menghitung  $\chi^2$ , dimana  $\chi^2 = n \cdot R^2$ . Kriteria yang digunakan adalah apabila  $\chi^2$  tabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai Obs\*R-squared, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak.

### **Koefisien determinasi (*goodness of Fit*)**

Menurut Gujarati (2003) Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan ukuran ringkas yang menginformasikan kepada kita seberapa baik sebuah garis regresi sampel sesuai dengan datanya. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Rumus untuk R<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:

### **Uji simultan**

Menurut Ghozali (2005) untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat tahapan pengujian sebagai berikut :

H<sub>0</sub>:  $\beta_1, \dots, \beta_6, \alpha_1, \dots, \alpha_{34} = 0$ . Semua variabel independen dapat mempengaruhi variabel secara simultan. Untuk menguji hipotesis ini digunakan F statistik dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F statistik dengan tingkat kepercayaan 95% atau membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.

### **Uji parsial**

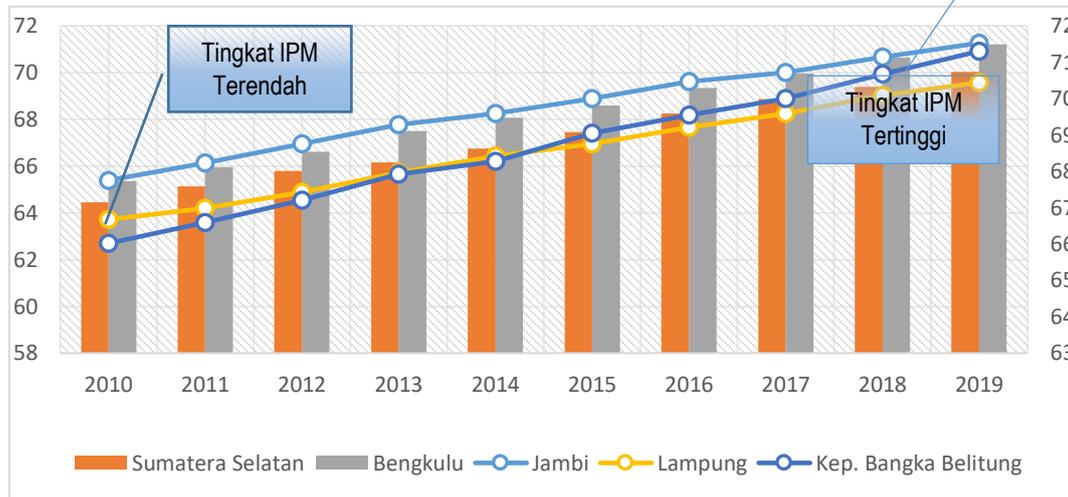
Menurut Gujarati (2003) Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, untuk menguji pengaruh variabel independen secara individu dapat dibuat hipotesis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Indeks pembangunan manusia (IPM)**

Indeks pembangunan manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pada hakikatnya IPM memiliki hubungan saling keterkaitan dengan ketimpangan ekonomi. Peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang maka semakin baik pula kualitas seseorang tersebut dalam menunjang kegiatan ekonomi (Tarmidzi, 2012)



**Grafik 1.** Tingkat IPM Provinsi Sumatera Bagian Selatan Tahun 2010-2019

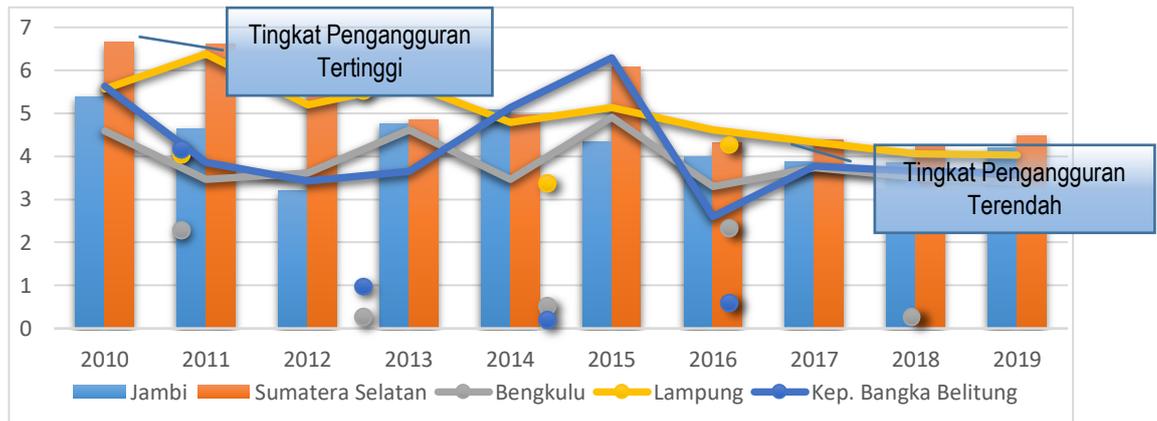
Dari Grafik 1 dapat dilihat data menunjukkan bahwa Tingkat IPM di Pulau Sumatera Bagian Selatan Provinsi Kep. Pulau Bangka Belitung menempati rata-rata tertinggi sebesar 68,65 diikuti Jambi sebesar 68,49, kemudian Provinsi Bengkulu sebesar 68,32, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 67,22 dan Provinsi Lampung sebesar 66,63. IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori tinggi karena dilihat komponen IPM itu sendiri yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita) mengalami peningkatan yang lebih baik. IPM Provinsi Lampung tergolong rendah dapat dilihat komponen IPM terdiri umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita itu pertumbuhannya melambat. Strategi kebijakan yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung yaitu melakukan percepatan atau akselerasi pertumbuhan pada komponen IPM seperti umur harapan hidup dilakukan sosialisasi kesehatan, pada rata-rata lama sekolah dapat menyiapkan program pendidikan wajib belajar yang lebih tinggi.

### Tingkat pengangguran terbuka

Data Pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini berupa Tingkat pengangguran terbuka menurut Provinsi Sumatera bagian selatan tahun 2010-2019.

Pada Grafik 2 dapat dilihat Tingkat pengangguran di Sumatera Bagian Selatan tahun 2010-2019 menunjukkan perbedaan antar wilayah ini. Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengangguran tertinggi dengan rata-rata 5,22 % diikuti Provinsi Lampung sebesar 4,98 %, kemudian Provinsi Jambi sebesar 4,33 %, Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 4,17 % dan Provinsi Bengkulu sebesar 3,86. Tingkat pengangguran Sumatera Selatan tinggi dikarenakan bertambahnya dari lulusan SMK yang menjadi penyumbang terbesar setiap tahunnya sekitar 35.000 belum ada sektor penyerapannya.

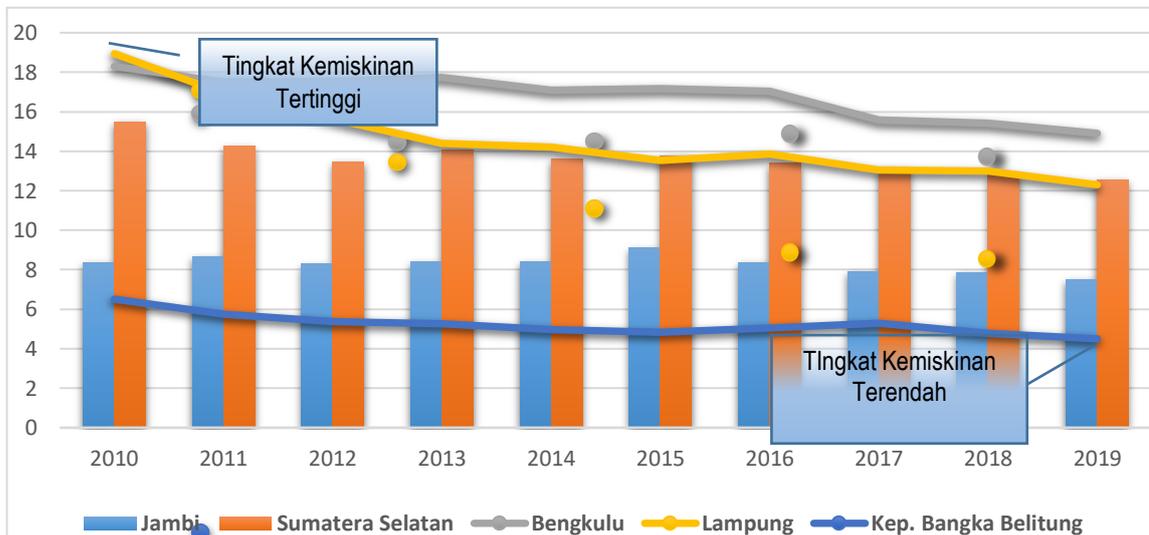
Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan kebijakan dengan menggandeng dan membuat MOU dengan perusahaan baik di industri, dunia usaha dan dunia kerja. Tingka pengangguran Provinsi Bengkulu yang rendah karena bertambahnya penduduk yang bekerja sebagian besar bekerja pada sektor informal 67,90 % dan sisanya pada sektor pertambangan dan penggalian. Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu bersinergi dan bekerja keras bersama Pemerintah Kabupaten dalam menekan angka pengangguran.



**Grafik 2.** Tingkat pengangguran terbuka menurut Provinsi di Sumatera bagian Selatan Tahun 2010-2019 (dalam persen)

### Tingkat kemiskinan

Data tingkat kemiskinan dalam penelitian ini berupa tingkat kemiskinan menurut Provinsi di Sumatera bagian selatan Tahun 2010-2019.



**Grafik 3.** Tingkat kemiskinan menurut provinsi di Sumatera Bagian Selatan 2010-2019 (dalam Persen)

Dari Grafik 3 terlihat adanya perbedaan tingkat kemiskinan diantara provinsi-provinsi yang terdapat di Sumatera Bagian Selatan tahun 2010-2019. Dilihat dari nilainya, terlihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan yang terendah dengan rata-rata sebesar 5,31 %, diikuti Provinsi Jambi sebesar 8,37 %, kemudian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,77 %, Provinsi Lampung sebesar 14,84 % dan Provinsi Bengkulu berada peringkat tertinggi tingkat kemiskinan sebesar 17,04 %.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu tergolong tinggi dikarenakan kurang terintegrasinya data kemiskinan, kurangnya akses terhadap lahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak ada. dari penyebab diatas diharapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu merumuskan kebijakan mengintegrasikan data berdasarkan byname byadress sehingga tepat sasaran misalnya pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin harus dari keluarga miskin juga. Selain itu diperlukan program peningkatan keberdayaan terhadap keluarga miskin seperti perbaikan akses pendidikan dan bantuan peluang usaha berupa modal usaha mikro. Tingkat kemiskinan Provinsi Bangka Belitung termasuk rendah dikarenakan dilihat dari angka garis kemiskinan yang tinggi di Indonesia sebesar 700.000 masih diatas angka nasional sebesar 400.000, hal ini sudah merupakan standar yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan bersinergi dengan Forkominda.

### Tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan

Ketimpangan pendapatan di wilayah sumatera bagian selatan berdasarkan Indeks Gini Ratio adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.** Indeks Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) di Wilayah Sumatera bagian Selatan Tahun 2010-2019

Provinsi	Tahun										Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Jambi	0.30	0.35	0.36	0.33	0.34	0.34	0.35	0.33	0.34	0.32	0.34
Sumatera Selatan	0.34	0.40	0.40	0.38	0.38	0.33	0.36	0.37	0.34	0.33	0.36
Bengkulu	0.37	0.37	0.36	0.37	0.36	0.37	0.35	0.35	0.36	0.34	0.36
Lampung	0.36	0.32	0.36	0.36	0.33	0.35	0.36	0.33	0.33	0.33	0.34
Kep. Bangka Belitung	0.30	0.32	0.31	0.31	0.30	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.29
<b>Rata-rata</b>	<b>0.33</b>	<b>0.35</b>	<b>0.36</b>	<b>0.35</b>	<b>0.34</b>	<b>0.33</b>	<b>0.34</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.32</b>	<b>0.34</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Dari Tabel 4 menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah di Sumatera bagian selatan secara rata-rata selama periode 2010-2019. Namun 5 Provinsi di Sumatera bagian Selatan mengalami tingkat pendapatan fluktuatif. Ketimpangan pendapatan yang berada 0,30-0,50 adalah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung termasuk dalam kategori sedang dikarenakan Provinsi dengan ketimpangan pendapatan terendah dibawah 0,30 adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung dikarenakan pemerataan ekonomi tersebut adalah dengan memberdayakan kemampuan ekonomi lokal dari masyarakat, seperti memajukan warung-warung ketimbang jaringan waralaba.

Dari hasil penemuan diatas menggambarkan bahwa Provinsi-provinsi di Sumatera bagian selatan yang memiliki pendapatan per kapita lebih besar ternyata pendapatan per kapitanya belum merata seperti Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikkan bahwa antar Provinsi-provinsi di Sumatera bagian selatan terjadi ketimpangan relatif sedang. Hal ini tidak terlepas dari perbedaan kemampuan tiap daerah juga dalam faktor pemilikan sumber daya manusia yang berkualitas, insfratruktur dan persebaran penduduk yang berimplikasi terhadap nilai tambah bruto (PDRB) dalam perekonomian antar daerah

## **Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan**

### **Analisis regresi linier terpilih (*fixed effect model*)**

Hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan. Dari hasil regresi data panel dengan *fixed effect* model diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Gini}_{it} = 0.497558 - 0.000694\text{IPM}_{it} - 0.039211\text{Pengangguran}_{it} + 0.000801\text{Kemiskinan}_{it} + \epsilon_{it}$$

(0,0125)      (0,8020)                      (0,0197)                      (0,8208)

Dari persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan hasil estimasi menggunakan aplikasi e-views dapat diinterpretasikan konstanta berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian Selatan, kemudian indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian Selatan, pengangguran berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian Selatan, dan terakhir kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian Selatan.

### **Pengujian asumsi klasik**

#### **Uji normalitas**

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui bentuk distribusi data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan Uji Jarque-Bera (JB test). Hasil analisis menunjukkan bahwa prob. Jarque-Bera sebesar 0,05897 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### **Uji multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antarvariabel bebas pada penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien korelasi antarvariabel bebas < 0,9 yang berarti bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada masing-masing variabel bebas.

#### **Uji heterokedastisitas**

Metode uji white untuk melihat ada tidanya heteroskedastisitas dalam model. Menurut Winarno menyatakan uji white menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen. Cara mendeteksi metode uji white dengan melihat Obs\*R-Squared dan nilai Chi Squares. Dari uji *white* yang ditampilkan di Lampiran nilai Obs\*R-squared 27.20735 lebih besar dari  $\alpha=5\%$  diduga tidak ada indikasi heteroskedastisitas.

### **Pengujian hipotesis statistik**

#### **Koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*)**

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) atau goodness of fit sebesar 0,732867 Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas dalam penelitian mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 73%. Sisa sebesar 27% dijelaskan variabel lain diluar model.

### **Uji signifikansi simultan F-Statistik**

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai Prob(F-statistic) sebesar  $0,000000 < 0,05$ . Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka Prob (F-statistic) lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi. Hal ini menjelaskan bahwa secara bersama-sama variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), pengangguran dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian Selatan.

### **Uji signifikansi parsial (Uji T)**

#### **Konstanta**

Dari hasil regresi diketahui nilai koefisien konstanta sebesar 0,497558 dengan nilai probabilitas sebesar  $0,0125 < 0,05$ , Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hal ini bermakna konstanta berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian selatan. Artinya apabila koefisien variabel lain tetap maka ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian selatan mengalami peningkatan sebesar 49,75 persen.

#### **Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan.**

Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel IPM sebesar  $-0,000694$  dengan probabilitas sebesar  $0,8020 > 0,05$ . Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini bermakna IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian selatan.

IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena di Sumatera Bagian Selatan sektor yang paling besar berkontribusi terhadap PDRB adalah sektor pertanian, kemudian diikuti sektor pertambangan dan di urutan ketiga adalah sektor industri, dalam kegiatan produksi ketiga sektor tersebut tidak membutuhkan pekerja dengan IPM tinggi namun dalam kegiatan produksi sektor tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar, sehingga tingkat IPM tidak mempengaruhi pendapatan perkapita di Sumatera Bagian Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Pradnyadewi (2017), berdasarkan pengolahan dengan program SPSS untuk menguji pengaruh langsung IPM pada ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, diperoleh *standardized coefficient* beta yaitu sebesar  $-0,287$  dan probabilitas sebesar  $0,227 > 0,05$ . Dapat dikatakan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

#### **Pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan**

Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel pengangguran sebesar  $-0,039211$  dengan probabilitas sebesar  $0,0197 < 0,05$ . Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih kecil dari 0,5. Hal ini bermakna tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Sumatera Bagian Selatan. Artinya kenaikan 1% nilai tingkat pengangguran terbuka akan diikuti penurunan ketimpangan pendapatan di wilayah sumatera bagian selatan sebesar 0,039211%.

Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat, akan tetapi pemerataan tersebut berada pada kelas perekonomian yang rendah. Jika dilihat dari segi pemerataan ekonomi masyarakat dengan tingginya tingkat pengangguran akan berdampak pada penurunan ketimpangan ekonomi, akan tetapi dilihat dari segi

kesejahteraan masyarakat hal tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan pembangunan di Indonesia

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2005) dimana tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan, kemudian hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Rinjani (2017), berdasarkan hasil regresi data panel menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

### **Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan**

Dari hasil regresi diketahui bahwa koefisien variabel Tingkat kemiskinan sebesar 0,000801 dengan probabilitas sebesar  $0,8208 > 0,05$ . Jika dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% maka probabilitas lebih besar 0,05. Hal ini bermakna tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan.

Tidak berpengaruhnya kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain diantaranya pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan pembangunan antara wilayah, dan banyaknya investasi pada proyek padat modal, kebijakan industri substitusi impor.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Ady Soejoto (2019), variabel kemiskinan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan. Pada hasil pengujian, hubungan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif. Artinya semakin tinggi kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi, atau sebaliknya. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan. Kemiskinan terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan minimum. Ketika kemiskinan berkurang, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kebutuhan minimum terpenuhi disebabkan pendapatan yang mereka peroleh semakin meningkat.

### **Implikasi kebijakan**

Berdasarkan hasil Penelitian “Dampak IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Bagian Selatan”. Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah Tingkat Pengangguran, hal ini mengindikasikan semakin tinggi tingkat pengangguran maka nilai ketimpangan pendapatan akan semakin meningkat. Pemerintah di setiap provinsi di Sumatera Bagian Selatan perlu merumuskan strategi perencanaan pembangunan dengan prioritas penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Bagian Selatan, strategi perencanaan pembangunan yang dirumuskan harus bersifat *sustainable* (berkelanjutan) dengan tujuan masalah pengangguran bisa teratasi. Bentuk perencanaan pembangunan yaitu membentuk sumber daya manusia yang menguasai teknologi untuk menghadapi tantangan dunia digital kedepannya, membuat kebijakan kurikulum pendidikan yang lebih berbasis kepada teknologi, meningkatkan skill pelaku UMKM dengan memberi pelatihan langsung dengan materi digital marketing. Kebijakan dalam menekan angka pengangguran yang ada di Sumatera Bagian Selatan juga dapat berupa membuka dan meningkatkan lapangan kerja padat karya di sektor-sektor potensial di industri perkebunan, pertanian dan pertambangan. Selain itu pengangguran tetap perlu ditanggulangi dengan seksama, meningkatkan upah minimum regional dan membuka lapangan pekerjaan merupakan cara yang cukup efektif, sehingga penghasilan orang-orang yang bekerja dapat dikatakan layak.

Mempermudah perizinan usaha dan pemberian bantuan berupa modal usaha bagi UMKM sebagai upaya meningkatkan terbentuknya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, terbentuknya UMKM dapat menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kalangan menengah keatas, lapangan kerja yang terbuka dari UMKM dapat menyentuh masyarakat yang IPM nya sedang maupun masyarakat yang tingkat IPM tinggi. Selain itu dengan melakukan pembinaan kepada pemulung, pengemis dan pengamen dengan membuat sebuah lembaga untuk meningkatkan kemampuan para pemulung, pengemis dan pengamen agar memiliki skill atau kemampuan yang dapat mereka gunakan untuk bekerja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perkembangan indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan berfluktuasi selama periode 2010-2019. Ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan selama periode 2020-2019 tergolong kategori sedang. Hasil pengujian regresi data panel menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut : Perkembangan indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan berfluktuasi selama periode 2010-2019, hal tersebut menunjukkan perlu perhatian serius dari pemerintah agar nilai IPM terus naik dan tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan menurun dari tahun ke tahun. Ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan tergolong dalam kategori sedang kondisi tersebut belum berada dalam zona aman, ketimpangan yang rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Bagian Selatan semakin meningkat. Variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran, penurunan angka pengangguran harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah provinsi Sumatera Bagian Selatan untuk menurunkan angka ketimpangan pendapatan di Sumatera Bagian Selatan. Kebijakan yang sustainable merupakan solusi bagi penurunan tingkat pengangguran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akai, N., & Sakata, M. (2005). *Fiscal decentralization, commitment and regional inequality: evidence from state-level cross-sectional data for the United States* (No. CIRJE-F-315). CIRJE, Faculty of Economics, University of Tokyo: Tokyo
- Arsyad, L. (2017). *Ekonomi pembangunan* (5th ed). UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Asmara, A., & Suci, S. C. (2019). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 6(1), 41–53. [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v6i1.24645](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24645)
- Christian Lessmann. (2009). *Fiscal decentralization and regional disparity*. 41(10), 2455–2473.
- Coulombe, S. (2007). Globalization and regional disparity: A Canadian case study. *Regional Studies*, 41(1), 1–17.
- Dajan, A. (2001). *Pengantar metode statistik jilid 1*. Penerbit Pustaka LP3ES.
- Dholakia, R. H. (2003). Regional disparity in economic and human development in India. *Economic and Political Weekly*, 4166–4172.
- Faisal Rinjani, Mochamad. (2017). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi*

- ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia Tahun 2010-2016* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018-07-05)
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi analisis multivariate dengan SPSS*. Badan Penerbit UNDIP.
- Gilarso. (2004). *Pengantar ilmu ekonomi makro*. Kanisius.
- Grover, D., & Rao, S. (2020). Inequality, unemployment, and poverty impacts of mitigation investment: evidence from the CDM in Brazil and implications for a post-2020 mechanism. *Climate Policy*, 1–17.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika dasar* (Terjemah Sumarno Zein (ed.)). Erlangga: Jakarta
- Habanik, J., Hostak, P., & Kutik, J. (2013). Economic and social disparity development within regional development of the slovak republic. *Economics & Management*, 18(3).
- Hartini, N. T. (2017). *Pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 53(9), 1–91.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Islami, F. S., & Nugroho, S. B. M. (2018). Faktor-faktor mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(1).
- Krinantya, N. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta. *Universitas Diponegoro*, 60.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi pembangunan*. Salemba Empat: Jakarta
- Lee, B., Peng, J., Li, G., & He, J. (2012). Regional economic disparity, financial disparity, and national economic growth: Evidence from China. *Review of Development Economics*, 16(2), 342–358.
- Maqin, R. A. (2011). Analisis disparitas pendapatan antar daerah di Jawa Barat. *War Bappeda*.
- Ni'matush Sholihah. (2013). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dan tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timtle*.
- Nurhuda, R. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 110–119.
- Payaman, J. S. (1997). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. FE UI: Jakarta
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. (2017). Pengaruh IPM, biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6, 255-285.
- Suci, S. C., & Asmara, A. (2018). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(1), 8–22. <https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.8-22>
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar teori makro ekonomi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sultan, & Sodik, J. (2010). Analisis ketimpangan pendapatan regional di DIY-Jawa Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi periode (2000-2004). *Buletin Ekonomi*, 8(1), 1–70.
- Tambunan, T. T. H. (2004). Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan: Kasus Indonesia. *Jurnal: Kajian Ekonomi*, 3(2).
- Tarmidzi, A. (2012). *Pengaruh PDRB, penduduk, IPM dan APBD terhadap konvergensi pendapatan di Indonesia tahun 2004-2011*.
- Todaro, M. P. (2004). *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi 7). Erlangga.
- Winarno, W. W. (2009). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan eviws*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.